

RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG TAHUN 2022



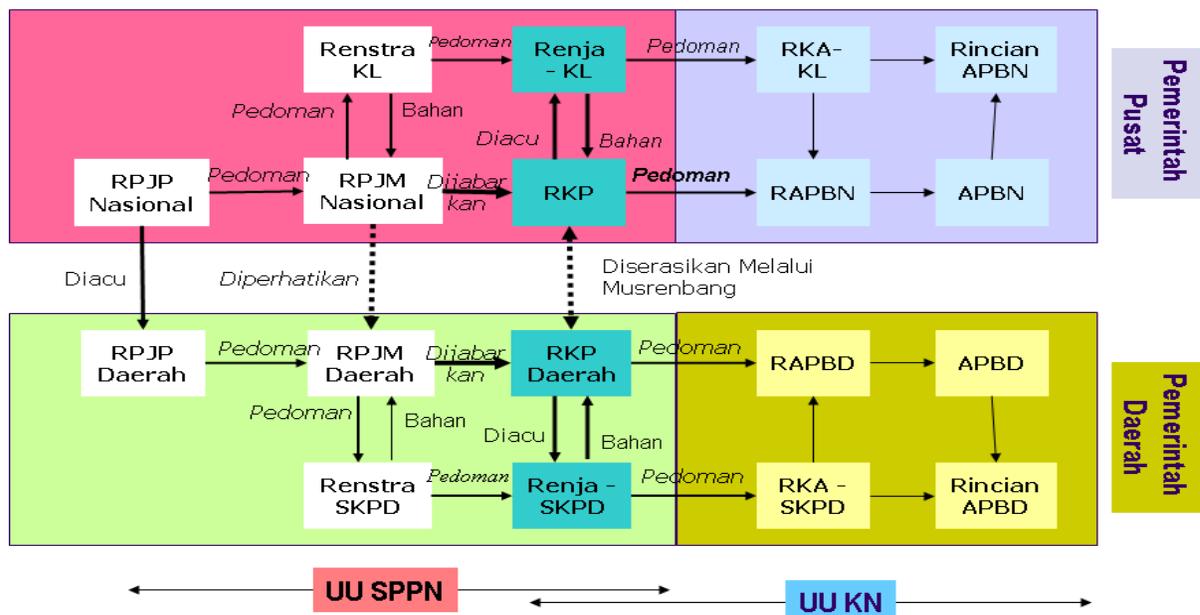
**DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI
2021**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. **Renja PD** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

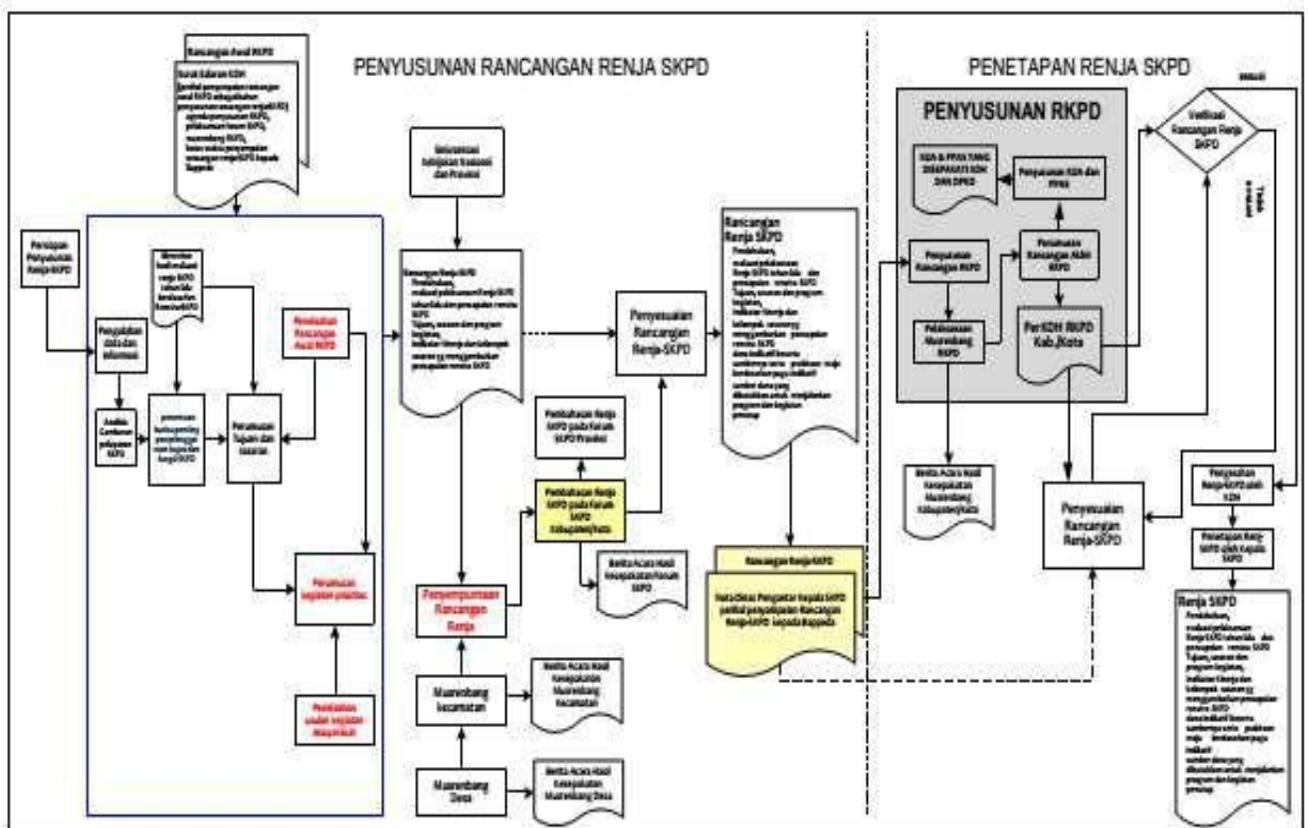
Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang

terdiri dari Lima Bab yaitu :

1. Pendahuluan
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
4. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup.

Keterkaitan Renja Dinas Tata Ruang dengan dokumen RKPD Kota Bekasi dijabarkan melalui Program kegiatan prioritas selama satu tahun (1 tahun) kedepan, karena Renja menjadi dasar pencapaian kinerja jangka pendek yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disusun juga berdasarkan RKPD Kota Bekasi, Renstra Dinas Tata Ruang serta berpedoman pada Renja Kementerian Pekerjaan Umum dan Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait, seperti DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kab. Bogor dan Kota Depok. Untuk lebih jelasnya tahapan dan keterkaitan dalam penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi;

-
7. Peraturan Wali Kota Bekasi 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2021 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun sehingga antara rencana dengan realisasi dalam satu tahun sesuai dengan target tahunan Rencana Strategis (Renstra). Melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, diharapkan kegiatan organisasi akan lebih terfokus, berkelanjutan dan akuntabel sehingga program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022 dapat tercapai.

Sedangkan tujuannya, antara lain adalah:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan RKPD Kota Bekasi tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Bekasi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama tahun 2022.
3. Menciptakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
4. Mempermudah sinergitas dan sinkronisasi dengan program-program nasional, provinsi dan daerah.

1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisannya.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Review terhadap

Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

Menguraikan tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang tahun 2022 dan Prakiraan Maju Prakiraan Maju tahun 2021, serta tabel Rumusan Rencana Pogram Prioritas Tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2018 Dinas Tata Ruang terbentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah tercapai sesuai dengan target indikator kinerja program RPJMD Kota bekasi yaitu :

- 1) Indikator Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota, target pada tahun 2020 yaitu 1 Dokumen dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 1 Dokumen (100%).
- 2) Indikator Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, target pada tahun 2020 yaitu 1 Dokumen dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 1 Dokumen (100%).
- 3) Indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan, target pada tahun 2020 yaitu 18,76% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 18,76% (100%).
- 4) Indikator Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, target pada tahun 2020 yaitu 51% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 51% (100 %)
- 5) Indikator Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW pada tahun 2020, target pada tahun 2020 yaitu 65% dan capaian kinerja dinas tata ruang yaitu 65% (100%).

Untuk pagu anggaran pada tahun 2020 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebesar Rp. 6.983.088.500,- dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.16.394.450,- atau 88,23%. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan pada tahun 2020 adalah 81,98%.

Di Tahun 2021 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melaksanakan 25 kegiatan yang terdiri dari 11 kegiatan belanja non urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17,898,578,000,- dan 14 kegiatan belanja urusan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 11,300,088,000. Dengan demikian total pagu anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 29,198,666.000,-. Kegiatan pada tahun 2021 terdiri dari :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
 - 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Pengadaan Pakaian Olahraga
 - 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**
 1. Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi
 2. Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP
 3. Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi
 - 7. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi
 2. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
 - 8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penyelenggaraan Verifikasi PSU
-

-
2. Penyelenggaraan TKPRD
 3. Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan
 4. Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase
 5. Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang
- 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
1. Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar/Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
 2. Penyevelan Bangunan dan Non Bangunan se Kota Bekasi
 3. Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi
 4. Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2021

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah** sesuai dengan Program Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu peningkatan koordinasi lintas SKPD terkait untuk mempersiapkan secara matang kerangka pelaksanaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga terlaksananya kegiatan pelaksanaan fisik agar tujuan dan arah pembangunan yang telah terukur dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki.

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*
Kota Bekasi**

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah pembangunan Inftrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota;	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan Review RDTR Kota Bekasi	Jumlah Materi Teknis Revisi dan Dokumen Naskah Akademis RDTR	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Jumlah Updating Foto Udara	-	-	-	-	-	5 photo BWP		
	Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Jumlah Kajian Kawasan Haritage Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
		Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	Jumlah Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen		

			Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
				persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	11,64%	11%	11%	11%	100%	11,64%	11,66%	100%
			Penyelenggaraan TKPRD	Jumlah Rekomendasi TKPRD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
			Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Jumlah Aplikasi SITARU	-	-	1 Sistem	1 Sistem	100%	1 Sistem		
			Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Jumlah Aplikasi Database Siteplan berbasis Website dan Android	-	-	-	-	-	1 Aplikasi		
			Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Jumlah Aplikasi sistem Informasi Pengelolaan	-	-	-	-	-	1 Aplikasi		
				Persentase penyerahan 150 PSU sampai tahun 2023								
			Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Jumlah Lokasi Perumahan PSU	25 Lokasi	25 Lokasi	25 Lokasi	25 Lokasi	100%	25 Lokasi	25 Lokasi	-
				Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50 %	60 %	65	65	100%	70%	-	-
			Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah Lokasi Penertiban dan pembongkaran bangunan yang melanggar / tidak memiliki IMB	20	20	10	10	100%	10	10	-
			Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi	Jumlah Lokasi Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung Se-Kota Bekasi	-	-	10	10	100%	10	10	
			Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Persentase sengketa Tata Ruang yang terfasilitasi	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

			Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Persentase berkas kualitas kehandalan gedung dan kelayakan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	-	-	100%	-	-	-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	-	-	100%	-	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	-	-	100%	-	-	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	-	-	100%	-	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	-	-	100%	-	-	-
			Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	-	-	100%	-	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	-	-	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kapasitas sumber daya aparatur	100 %							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	-	-	-	-	100%	-	-	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur					100%	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	100 %							
			Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-

			Mesin Lainnya								
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	100%	-	-
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	100%	-	-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2018 Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain mengacu pada RPJMD 2019-2023 juga mengacu pada PERMENPU14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang tersebut meliputi:

1. Informasi Penataan Ruang
2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
3. Izin Pemanfaatan Ruang
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebarkan kuesioner/instrumen monitoring dan evaluasi ini dalam rangka pembinaan umum dan teknis oleh K/L.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak termasuk kedalam salah satu dinas pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam pencapaian SPM, Dinas Tata Ruang berperan sebagai penyedia data pendukung bagi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berupa Data lahan/kawasan. Terdapat 2 unsur pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Tabel 2.2
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang
KOTA BEKASI**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses Penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
3	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
4	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
5	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	25%	25%	25%	25%	25%	25%	10.72 %	11%	-	-	

2.3. **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD**

Tantangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat diangkat dari beberapa faktor seperti berikut ini:

- **Posisi Kota Bekasi**

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawa konsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, permukiman dan ekonomi kreatif.

Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*countermagnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah insentifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar keseluruh wilayah Kota Bekasi.

Akibat logis dari letak geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain yakni bahwa wilayah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai tujuan urbanisasi terutama bagi para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan beban wilayah yang cukup tinggi pula, seperti lahan untuk perumahan, prasarana sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.

- **Perkembangan ekonomi kreatif**

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.

- **Visi Misi Pembangunan Kota Bekasi**

Garis besar RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mencakup visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2018-2023. Visi Kota Bekasi: “Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Misi yang tercantum adalah:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

-
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
 4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
 5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Selain tantangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan, ada pula peluang yang terjadi pada Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Pemerintah kota Bekasi khususnya Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi, yaitu :

1. Hingga tahun 2017 realisasi program perencanaan tata ruang telah terlaksana dengan tersusunnya naskah akademis dan rancangan peraturan daerah pedoman pemanfaatan ruang baik rencana umum, rencana detail, rencana teknis maupun rencana operasional;
2. Pendampingan bagi masyarakat oleh lembaga non pemerintah yang mempunyai pemahaman terhadap RDTR
3. Diperlukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Ruang serta Verifikasi dan Kajian terhadap permohonan pemanfaatan Ruang
4. Perlu ditingkatkan kegiatan penyegelan dan pembongkaran serta sosialisasi keseluruhan kota dan diberitakan kepada masyarakat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha/pemilik bangunan
5. Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan private untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.

Pada Tahun 2017 tingkat keberhasilan Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dikatakan telah berhasil dan terpenuhi dalam hal Informasi Penataan Ruang, Keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), Izin pemanfaatan ruang, pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang. Sedangkan untuk kinerja pelayanan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, masih mengalami kendala sehingga belum bisa terpenuhi dikarenakan data untuk rasio RTH per wilayah perkotaan dihitung dari luasan tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dimana terdapat 17 Goals, dimana pada goal 11 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi termasuk dalam tujuan tersebut yaitu **“Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh**

Dan Berkelanjutan". Hasil Evaluasi Renstra Dinas Tata Ruang yang memuat rancangan hasil evaluasi sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan pembangunan, Review dilakukan melalui penelaahan indikator kinerja Renstra K/L Provinsi, RTRW, KLHS dan Renstra Provinsi Jawa Barat sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah kab/kota dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif,efisien dan dapat tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Bekasi, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun dengan tema "**Perwujudan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota yang Maju, Aman, Cerdas, serta Lingkungan yang Nyaman**". Secara upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pengelolaan tata ruang telah disusun rencana program kegiatan tahun 2019.

Penjelasan tentang program/kegiatan didalam Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah : DINAS TATA RUANG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.932.724.000					17.244.337.192	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	815.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	565.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bekasi Selatan	Terpenuhinya alat tulis kantor dan makanan minuman harian	100 %	230.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bekasi Selatan	Terpenuhinya alat tulis kantor dan makanan minuman harian	100 %	230.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100 %	145.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bekasi Selatan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100 %	145.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Selatan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bekasi Selatan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Selatan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	100 %	140.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Selatan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	100 %	140.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bekasi Selatan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bekasi Selatan	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	-	
	Pengadaan Pakaian Olahraga	Bekasi Selatan	Terpenuhinya pakaian olahraga	100 %	100.000.000	Pengadaan Pakaian Olahraga	Bekasi Selatan	Terpenuhinya pakaian olahraga	100 %	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100 %	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100 %	220.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100 %	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100 %	20.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Bimbingan Teknis Pegawai	100 %	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Bimbingan Teknis Pegawai	100 %	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bekasi Selatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	865.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bekasi Selatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	794.856.192	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100 %	865.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bekasi Selatan	Terpenuhinya Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100 %	794.856.192	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bekasi Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	205.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bekasi Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	190.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bekasi Selatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat	100 %	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bekasi Selatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat	100 %	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bekasi Selatan	Persentase pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %	55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bekasi Selatan	Persentase pemeliharaan Peralatan Kantor	100 %	40.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bekasi Selatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	16.026.924.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bekasi Selatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	15.314.481.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Selatan	Tersusunnya Dokumen SAKIP, LAKIP, Renstra, Renja, LPPD	100 %	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Selatan	Tersusunnya Dokumen SAKIP, LAKIP, Renstra, Renja, LPPD	100 %	10.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang	100 %	16.016.924.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang	100 %	15.304.481.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %	10.000.000	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah				9.885.776.000	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah				6.764.124.630	
PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota,	1 Dokumen	1.750.000.000	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota,	1 Dokumen	700.000.000	
Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi	Kota Bekasi	Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi	100 %	250.000.000	Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi	Kota Bekasi	Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi	100 %	200.000.000	
Penyusunan RTBL Kawasan Kumuh	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen RTBL Kawasan Kumuh	1	1.000.000.000	Penyusunan RTBL Kawasan Kumuh	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen RTBL Kawasan Kumuh	1	500.000.000	
Penyusunan Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang Kota Bekasi	1	500.000.000	Penyusunan Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang di Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang Kota Bekasi	1	-	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	1 Dokumen	1.700.000.000	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	1 Dokumen	500.000.000	
Penyusunan Data RTH Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Data RTH Kota Bekasi	1	500.000.000	Penyusunan Data RTH Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Data RTH Kota Bekasi	1	300.000.000	
Penyusunan Kajian Kesesuaian Pembangunan Jaringan Prasarana dengan Rencana Tata Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian penataan kawasan strategis kota yang	1	600.000.000	Penyusunan Kajian Kesesuaian Pembangunan Jaringan Prasarana dengan Rencana Tata Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian penataan kawasan strategis kota yang	1	-	

Penyusunan Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang	1	600.000.000	Penyusunan Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang	1	-	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)	1	400.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)	1	200.000.000	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	19 %	3.575.800.000	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	19 %	2.622.951.362	
		Persentase penyerahan 150 PSU pada Tahun 2023	85 %				Persentase penyerahan 150 PSU pada Tahun 2023	85 %		
Penyelenggaraan Verifikasi PSU		Jumlah Verifikasi PSU Perumahan	25	1.134.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi PSU		Jumlah Verifikasi PSU Perumahan	25	743.424.824	
Pemeliharaan dan Operasional Sistem Informasi Ketatakotaan		Pemeliharaan Aplikasi SITARU	100%	500.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Sistem Informasi Ketatakotaan		Pemeliharaan Aplikasi SITARU	100%	939.914.079	
Pemeliharaan Database Rencana Tapak Terintegrasi dengan Masterplan Drainase		Pemeliharaan Database Siteplan berbasis Web dan Android	100%	741.800.000	Pemeliharaan Database Rencana Tapak Terintegrasi dengan Masterplan Drainase		Pemeliharaan Database Siteplan berbasis Web dan Android	100%	545.234.544	
Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang		Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital	100%	800.000.000	Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang		Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital	100%	394.377.915	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	75%	2.859.976.000	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	75%	2.941.173.267	
Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar/Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan		Lokasi yang ditertibkan	5		1.591.288.000	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar/Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan		Lokasi yang ditertibkan		5
Penyegelan Bangunan dan Non Bangunan se Kota Bekasi		Lokasi yang ditertibkan	5	877.512.000	Penyegelan Bangunan dan Non Bangunan se Kota Bekasi		Lokasi yang ditertibkan	5	345.584.395	

Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi		Jumlah sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi yang terfasilitasi	5	391.176.000	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi		Jumlah sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi yang terfasilitasi	5	197.490.577	
Pengawasan Pengendalian Bangunan di Wilayah Kota Bekasi		Jumlah Dokumen Data Pengawasan Bangunan sesuai Rencana Tapak	1	300.000.000	Pengawasan Pengendalian Bangunan di Wilayah Kota Bekasi		Jumlah Dokumen Data Pengawasan Bangunan sesuai Rencana Tapak	1	1.902.767.288	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan		1.254.492.000,-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan		1.152.048.028	
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG		Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan		1.254.492.000,-	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Kota Bekasi yang memiliki IMB & SLF		1.152.048.028	
Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2022		Jumlah Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi	5	738.992.000	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2022		Jumlah Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi	5	742.519.964	
Penyelenggaraan verifikasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung		Jumlah Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	35	215.500.000	Penyelenggaraan verifikasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung		Jumlah Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	30	409.528.064	
TOTAL				29.072.992.000					25.160.509.850	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 ini, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari dinas terkait/badan/kantor Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada dinas terkait/badan/kantor maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Untuk usulan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi serta kebutuhan dinas telah diakomodir dalam usulan rencana kerja, namun untuk usulan kegiatan yang kurang sesuai dengan tupoksi telah diteruskan ke masing-masing dinas terkait/ badan/ kantor yang terkait.

Program kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2022 yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung**. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Mekanisme Musrenbang kota Bekasi tahun 2022. Rencana program dan kegiatan Dinas Tata Ruang yang terdapat pada RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KOTA BEKASI

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Acuan dasar setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Jangka Menengah selanjutnya tertuang dalam Rencana Strategis SKPD sebagaimana Visi dan Misi dinas terkait, Oleh karenanya Renstra yang dirumuskan atau disusun harus mampu menempatkan atau mengakomodir "kebutuhan dasar (*basic needs*) maupun kebutuhan pembangunan (*development need*) di bidang ke-penataan ruang sebagai prioritas utama, yang outputnya dapat menunjang 45 (Empat Puluh Lima) program yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi salah satu diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah sebagai berikut :

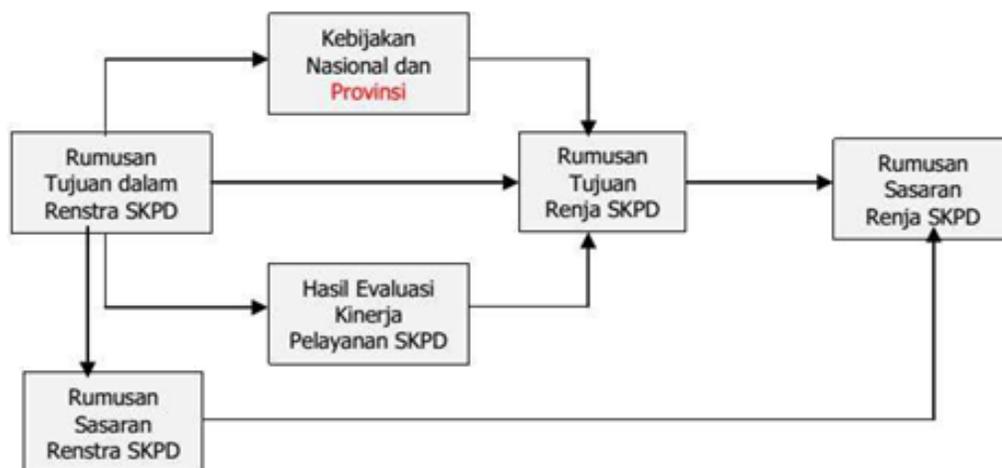
- Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "Bekasi City Techno Park"
- Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.)
- Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya)
- Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat dilihat dari tahun 2012 sebagai eksisting tahun sebelumnya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat dari hubungan antara isu strategis Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, RKPD Pemerintah Kota Bekasi dan tupoksi Dinas Tata Ruang. Memperhatikan keterkaitan hubungan antar isu Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten memberi gambaran bahwa terdapat beberapa agenda bersama yang harus diselesaikan melalui program kegiatan pembangunan di tahun 2021. Dalam rangka penyelesaian isu strategis tersebut, masing-masing tingkatan pemerintahan (Nasional, Provinsi dan Kota) diharapkan dapat dalam mengalokasikan anggaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Tabel 3.1
Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



VISI DAN MISI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor Peraturan Wali Kota Bekasi 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Serta pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna memberi inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya suatu organisasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasinya.

A. VISI

Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud tersebut Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merumuskan visi organisasi yaitu :

“Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang Berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan Kreatif menuju masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Ihsan”.

Penjabaran arti dari visi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tata Ruang bertekad menjadi dinas utama dan terdepan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
2. Berkelanjutan : perencanaan tata ruang yang mengikuti kebutuhan kota yang dinamis dan pertumbuhan masyarakat perkotaan yang maju dan modern
3. Akuntabel : pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang di dapatkan.
4. Cerdas : kemampuan untuk memotivasi diri dalam memecahkan masalah atau menciptakan inovasi baru yang bernilai.
5. Kreatif : kemampuan untuk menciptakan, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya
6. Maju, Sejahtera dan Ihsan merupakan Tujuan akhir penataan ruang kota yang menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dalam upaya pengelolaan prasarana dan sarana demi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang teratur dan tertata dengan baik sehingga layak untuk dihuni.

B. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang. Dalam upaya mencapai visi dinas, maka misi Dinas Tata Ruang adalah:

1. Merencanakan Tata Ruang kota untuk pembangunan yang berkelanjutan
2. Mewujudkan ketersediaan RTH Perkotaan
3. Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan yang efektif dan berkeadilan
4. Memfasilitasi pemanfaatan ruang kota untuk pengembangan dunia usaha yang kreatif

Tujuan Dinas Tata Ruang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selain itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan uraian mengenai visi dan misi di atas, misi Kota Bekasi yang terkait erat dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Misi 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel.

Sedangkan Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan misi RPJMD Kota Bekasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel
2. Mewujudkan Tata Ruang yang Berkelanjutan.

Sasaran Dinas Tata Ruang

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Sasaran Misi 2 pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah **Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah, dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar** dan Sasaran Misi 1 pada RPJMD yang terkait pada seluruh OPD di Kota Bekasi adalah **Meingkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah**

Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang yang merupakan penjabaran atas tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya Pengatuan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.

Pemerintah Kota memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang dalam Pengendalian Ruang dan Bangunan dimana selaku Satuan Perangkat Daerah membutuhkan suatu aturan yang dapat mensinkronkan kewenangan-kewenangan tersebut. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Salah satu diantaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang. Sedangkan fungsinya adalah :

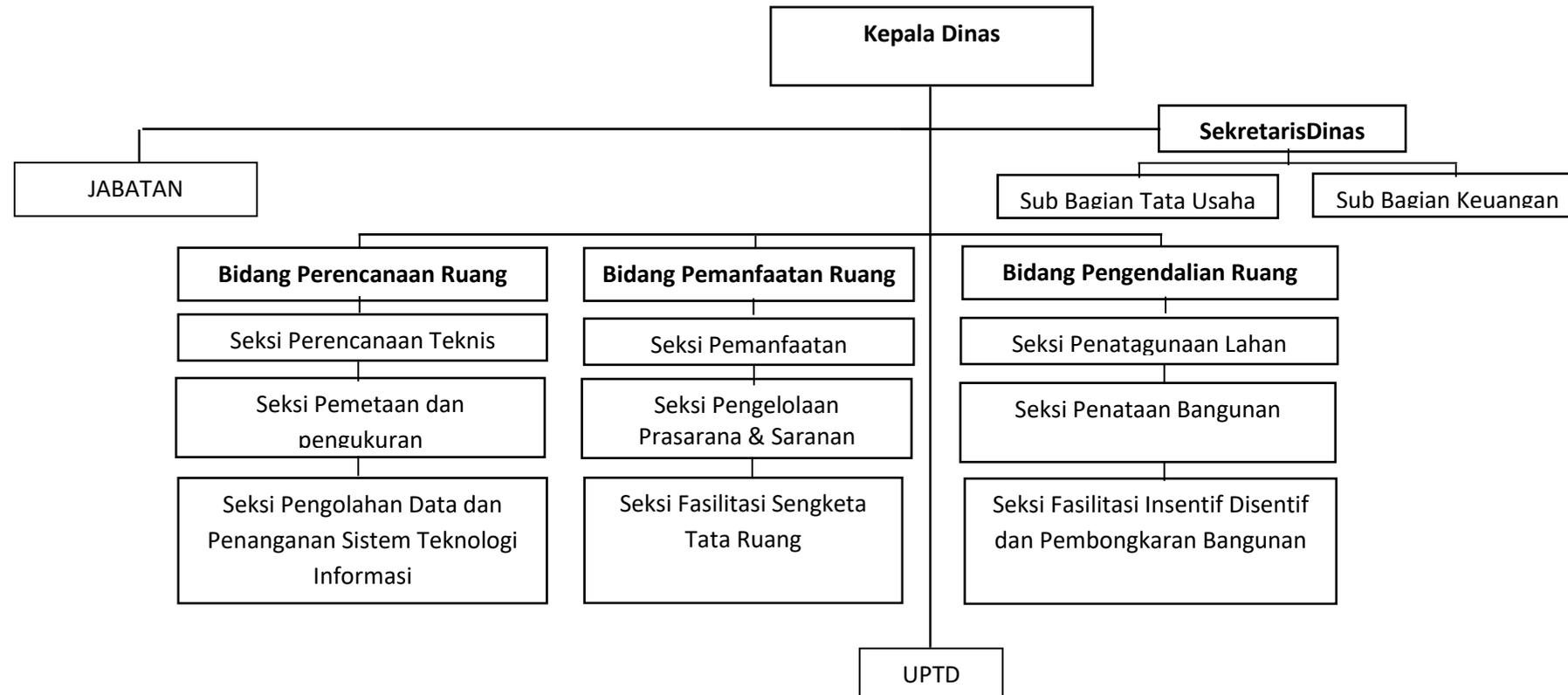
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan perkotaan yang meliputi perencanaan tata ruang, Penatagunaan lahan, Pengendalian dan Pengawasan Lahan dan Bangunan dan Penataan Bangunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Teknis
 - b. Seksi Pemetaan dan Pengukuran
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Penanganan Sistem Teknologi Informasi
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
 - a. Seksi Pemanfaatan Bangunan
 - b. Seksi Pengelolaan Prasarana dan Sarana
 - c. Seksi Fasilitasi sengketa Tata Ruang
5. Bidang Pengendalian Ruang
 - a. Seksi Penatagunaan Lahan
 - b. Seksi Penataan Bangunan
 - c. Seksi Fasilitasi Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam upaya untuk melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu pengemban tugas pengelolaan penataan ruang Kota Bekasi, Terdapat 2 (Satu) program utama yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah dan Program Penataan Bangunan Gedung**, yang terdiri dari 17 kegiatan pada tahun 2022. Program ini memiliki beberapa indikator program yang juga merupakan indikator program Rencana Strategis Dinas Tata Ruang 2019-2023 dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2019-2023.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kota Bekasi yaitu “Bekasi kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan ihsan”.
2. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tertuang pada Peraturan Walikota Bekasi
3. Pengembangan perencanaan tata ruang mengacu pada RTRW dan RDTR
4. Penetapan kawasan Ruang Terbuka hijau (RTH)
5. Penerapan pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang
6. Verifikasi prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PREKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA BEKASI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KITNERJA N+1	KEBUTUHAN DANA N+1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				23.630.360.429				26.416.914.440
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH		Kota Bekasi		5.598.806.630	PAD			7.234.049.440
	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan	Kota Bekasi	1 Dokumen	496.000.000	PAD		1 Dokumen	1.300.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTBL Kawasan TOD Stasiun Bekasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	380.000.000	PAD			600.000.000
	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RDTR		1 Dokumen					

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Peraturan dan Sistem Kota Bekasi	Kota Bekasi	200 Orang	116.000.000	PAD			200.000.000
	Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Kota Bekasi	1 Dokumen	380.000.000	PAD		1 Dokumen	600.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Basis Data RTH Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	230.000.000	PAD			300.000.000
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)	Kota Bekasi	1 Dokumen	150.000.000	PAD			300.000.000
	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan		18,88%				19%	
	Persentase penyerahan 150 PSU pada Tahun 2023		68%				85%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan RTH publik di Kota Bekasi	Kota Bekasi	0.12 %	2.045.447.362	PAD		0.12%	2.612.723.760
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Verifikasi PSU Perumahan	Kota Bekasi	25 Lokasi	692.170.113	PAD			741.173.780

Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pemutakhiran Aplikasi SITARU	Kota Bekasi	1 Aplikasi	1.353.277.250	PAD			1.871.549.980
	Jumlah Pemeliharaan dan Pemutakhiran Database Siteplan berbasis Web dan Android		1 Aplikasi					
	Jumlah Pemutakhiran Aplikasi Arsip Digital Tata Ruang		1 Aplikasi					
	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW		70%				75%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RDTR	Kota Bekasi	70%	2.677.357.268	PAD		75%	2.721.325.680
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Lokasi yang ditertibkan	Kota Bekasi	14 Lokasi	856.893.980	PAD			834.363.700
	Jumlah Dokumen Laporan Penyelesaian sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi		1 Dokumen					
	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Fasilitasi Sengketa Tata Ruang		1 Dokumen					
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Data Pengawasan Bangunan sesuai Rencana Tapak	Kota Bekasi	1 Dokumen	1.820.463.288	PAD		75%	1.886.961.980
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Kota Bekasi		946.548.028	PAD			1.147.533.940
	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang		90%				90%	

	diterbitkan							
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan	Kota Bekasi	90%	946.548.028	PAD		90%	1.147.533.940
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Verifikasi Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan	Kota Bekasi	1 Dokumen	946.548.028	PAD		100%	1.147.533.940
	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan		30 SLF				100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Bekasi		17.085.005.771	PAD			17.819.521.060
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik		100%				100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	100%	10.000.000	PAD		100%	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP	Kota Bekasi	1 Dokumen	10.000.000	PAD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Premi BPJS ASN Dinas	Kota Bekasi	100%	15.314.481.000	PAD		100%	16.096.394.000

	Tata Ruang							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang	Kota Bekasi	1140 Orang/Bulan	15.304.481.000	PAD			16.086.394.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	PAD			10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Bekasi	100%	20.000.000	PAD		100%	20.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga	Kota Bekasi						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Kota Bekasi	5 Orang	20.000.000	PAD			20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis	Kota Bekasi	72 Orang	200.000.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	500.000.000	PAD		100%	715.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Kota Bekasi	13.791 Unit	334.000.000	PAD			230.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kota Bekasi	30 Unit	41.000.000	PAD			145.000.000
	Jumlah Penggandaan	Kota Bekasi	49.655 Lembar					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	284 Buku/Eksemplar	25.000.000	PAD			50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	Kota Bekasi	124 Kali	100.000.000	PAD			140.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Bekasi	100%	70.950.000	PAD		100%	150.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	Kota Bekasi	6 Unit	50.000.000				129.050.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Kota Bekasi	9 Unit	20.950.000				20.950.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	829.574.771	PAD		100%	788.127.060
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bekasi	204 Orang/Bulan	829.574.771				788.127.060
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	190.000.000	PAD		100%	190.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	5 Unit	61.500.000	PAD			61.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional dan Lapangan		32 Unit	88.500.000				88.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	Kota Bekasi	30 Unit	40.000.000	PAD			40.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu dalam **“Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota yang Cerdas, Maju, Kreatif, Aman, serta Lingkungan yang Nyaman ”**.

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPJMD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja). Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2022 adalah sebanyak 5 kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan untuk 13 Sub kegiatan dan 5 Kegiatan Belanja Penunjang Urusan untuk 17 Sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan yang sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah Kota Bekasi sebesar Rp. 29.082.992.000,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*). Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2021 yang akan digunakan untuk Pembangunan Kota Bekasi.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Tata ruang Kota Bekasi memiliki rencana kerja atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Wajib

Untuk rencana kerja tahun 2022, program, indikator program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tata Ruang adalah:

▪ **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**

Untuk indikator kinerja Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, kegiatan dan Sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP
 - a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataaan Ruang

Untuk indikator Kinerja Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Untuk indikator Kinerja Presentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan dan indikator Kinerja Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

-
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - b. Sistem Informasi Penataan Ruang

▪ **Program Penataan Bangunan Gedung**

Untuk mendukung indikator kinerja Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2019-2023

- Pengembangan layanan publik berbasis IT
- Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
- Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage)
- Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 , sedangkan Rencana Program Prioritas Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 dituangkan dalam tabel 4.2 dibawah ini.

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DINAS TATA RUANG TAHUN 2022
KOTA BEKASI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				23.787.885.429		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH		Kota Bekasi		5.721.431.630	PAD	
	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota		1 Dokumen			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan	Kota Bekasi	1 Dokumen	496.000.000	PAD	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTBL Kawasan TOD Stasiun Bekasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	380.000.000	PAD	
	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RDTR		1 Dokumen			
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Peraturan dan Sistem Kota Bekasi	Kota Bekasi	200 Orang	116.000.000	PAD	

	Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota		1 Dokumen			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Kota Bekasi	1 Dokumen	380.000.000	PAD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Basis Data RTH Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	230.000.000	PAD	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)	Kota Bekasi	1 Dokumen	150.000.000	PAD	
	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan		18,88%			
	Persentase penyerahan 150 PSU pada Tahun 2023		68%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan RTH publik di Kota Bekasi	Kota Bekasi	0.12 %	2.045.447.362	PAD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Verifikasi PSU Perumahan	Kota Bekasi	25 Lokasi	692.170.113	PAD	
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pemutakhiran Aplikasi SITARU	Kota Bekasi	1 Aplikasi	1.353.277.250	PAD	
	Jumlah Pemeliharaan dan Pemutakhiran Database Siteplan berbasis Web dan Android		1 Aplikasi			
	Jumlah Pemutakhiran Aplikasi Arsip Digital Tata Ruang		1 Aplikasi			

	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW		70%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RDTR	Kota Bekasi	70%	2.799.984.267	PAD	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Lokasi yang ditertibkan	Kota Bekasi	14 Lokasi	922.216.979	PAD	
	Jumlah Dokumen Laporan Penyelesaian sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi		1 Dokumen			
	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Fasilitasi Sengketa Tata Ruang		1 Dokumen			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Data Pengawasan Bangunan sesuai Rencana Tapak	Kota Bekasi	1 Dokumen	1.877.767.288	PAD	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Kota Bekasi		981.448.028	PAD	
	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan		90%			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan	Kota Bekasi	90%	981.448.028	PAD	
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Verifikasi Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan	Kota Bekasi	1 Dokumen	981.448.028	PAD	
	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan		30 SLF			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Bekasi		17.085.005.771	PAD	
	Terlaksananya Tata Pemerintahan Yang Baik		100%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	100%	10.000.000	PAD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP	Kota Bekasi	1 Dokumen	10.000.000	PAD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang	Kota Bekasi	100%	15.314.481.000	PAD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang	Kota Bekasi	1140 Orang/Bulan	15.304.481.000	PAD	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kota Bekasi	1 Laporan	10.000.000	PAD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Bekasi	100%	20.000.000	PAD	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga	Kota Bekasi				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Kota Bekasi	5 Orang	20.000.000	PAD	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis	Kota Bekasi	72 Orang	200.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	500.000.000	PAD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Kota Bekasi	13.791 Unit	334.000.000	PAD	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kota Bekasi	30 Unit	41.000.000	PAD	
	Jumlah Penggandaan	Kota Bekasi	49.655 Lembar			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	284 Buku/Eksemplar	25.000.000	PAD	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	Kota Bekasi	124 Kali	100.000.000	PAD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Bekasi	100%	70.950.000	PAD	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	Kota Bekasi	6 Unit	50.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Kota Bekasi	9 Unit	20.950.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bekasi	100%	829.574.771	PAD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bekasi	204 Orang/Bulan	829.574.771		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	190.000.000	PAD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	5 Unit	61.500.000	PAD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional dan Lapangan		32 Unit	88.500.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	Kota Bekasi	30 Unit	40.000.000	PAD	

BAB V PENUTUP

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi memiliki visi untuk “Mewujudkan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bekasi menuju Kota Hunian dan Usaha Kreatif yang Dinamis dan Nyaman”. Dalam proses mewujudkan visi tersebut tentu akan banyak persoalan serta kendala yang dihadapi. Hal terpenting adalah bagaimana merumuskan penyelesaian persoalan dengan mencari jalan terbaik (win solutions) dan kerugian paling minimal.

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2022 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi. Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2022 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2) Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, APBD Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota dan Renstra PD).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renja ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Rancangan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pihak manajemen dan seluruh staf Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa datang.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.

Bekasi, 21 Desember 2021
KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI

Drs. JUNAEDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19661006 198603 1 008